

**FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM UPAYA
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG
KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Dakwah

Oleh :

Ghiffari Ananda Gumay

1541020078

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2020 M/1441 H**

**FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM UPAYA
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG
KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Dakwah

Oleh :

Ghiffari Ananda Gumay

1541020078

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I : Dr. Jasmadi, M.Ag

Pembimbing II : Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2020 M/1441 H**

ABSTRAK

FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

Ghiffari Ananda Gumay

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Di sini lah banyak potensi yang dapat dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Apabila perekonomian Desa maju dan berkembang maka perekonomian Negara ikut maju dan berkembang. Pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar sehingga pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah, maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan Desa. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi BUMDes dalam upaya pengembangan usaha masyarakat di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi (BUMDes) dalam pengembangan usaha masyarakat di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Alat yang penulis gunakan untuk pengumpulan data adalah hasil dokumentasi, wawancara dan observasi. Untuk menentukan sampel, menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang penulis berikan maka sampel berjumlah 7 orang yang terdiri dari pengurus BUMDes dan warga masyarakat pemilik usaha yang terikat dengan BUMDes Desa Negeri Agung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam pengembangan usaha masyarakat dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu membuka unit peminjaman modal usaha, melakukan penyuluhan, membantu memasarkan produk-produk hasil kegiatan BUMDes dan pelatihan kewirausahaan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa adanya BUMDes mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Upaya-upaya dalam pengembangan SDM melalui BUMDes diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.

Kata kunci : Pengembangan Usaha Masyarakat, BUMDes

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghiffari Ananda Gumay

NPM : 1541020078

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Masyarakat Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada padapenyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2020

Penulis,

Ghiffari Ananda Gumay

1541020078

HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi yang berjudul FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA
MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG
KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN
TANGGAMUS**

Nama : GHIFFARI ANANDA GUMAY

NPM : 1541020078

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nasrudin, M.Ag
NIP. 196106181990031003

Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I
NIP. 196508171994031005

Mengetahui

Ketia Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. H. M. Mawardi L, M.Si
NIP. 196612221995031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Letnan Kolonel H. Endro Supratni Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ 0721-704030

PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul **"FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS"** di susun oleh **GHIFFARI ANANDA GUMAY**, NPM **1541020078**, program studi **Pengembangan Masyarakat Islam**. Telah di ujikan dalam sidang Munagasyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari Jum'at, 26 Juni 2020

TIM PENGUJI

Kenia : Dr. H. M. Mawardi J, M.Si

Sekretaris : Fiqih Satria, M.T.I

Penguji I : H. Zamharri, S.Ag., M.Sos.I

Penguji II : Dr. Jasmadi, M.Ag

Mengetahui



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NTP: 196104091990031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, Maka tak ada yang menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(Q.S Ar-Raad:11)

PERSEMBAHAN

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan bangga, saya persembahkan karya ini kepada :

1. Ayahanda Gunawan Rosa dan Ibunda Ida Fadjiati tercinta yang berkat doanya yang tak pernah putus dan yang telah bersusah payah memberikan segalanya demi keberhasilan dan cita-citaku. Terimakasih atas bantuan, dukungan serta kasih sayangnya yang begitu besar dan mulia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adiku Ghaly Raihan Atsil tersayang yang tidak pernah bosan memotivasi dan menyemangatiku serta keluarga besarku yang tercinta.
3. Sahabat-sahabat tersegalanya Suci Alhaj Munita, Diana Lorenza, Devi Sylfiani, Rifqy Widayuni, Agus Siswanto, Irfan Machofa, Hesti Nur Sahadatilah, Angelia Ramadhani, terimakasih atas semua kesempatan yang telah kalian berikan untuk bisa berbagi segala kisah dan pengalaman yang tak terlupakan.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung serta seluruh civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniasi.

RIWAYAT HIDUP

Ghiffari Ananda Gumay, dilahirkan di Depok pada tanggal 28 Mei 1997, anak pertama dari dua saudara buah hati pasangan Bapak Gunawan Rosa dan Ibu Ida Fadjriati.

Riwayat pendidikan dimulai dari TK Aisyiyah 9 kota Depok Jawa Barat tamat pada tahun 2003 dan kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar SDN 1 Sinar Semendo tamat pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Talang Padang tamat pada tahun 2012. Setelah lulus kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Talang Padang mengambil jurusan IPA dan tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu UIN Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

Bandar Lampung, Januari 2020

Ghiffari Ananda Gumay

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS.**

Shalawat beriring salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kita termasuk umatnya sampai akhir jaman.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak, kiranya tidak berlebihan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan nasihat dan motivasi tidak henti-hentinya kepada mahasiswanya.
2. Bapak Dr. H. M. Mawardi J. M.Si dan H. Zamhariri, S.Ag M.Sos.I selaku ketua dan sekretaris jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan pengarahan dan motivasi selama perkuliahan.

3. Bapak Dr. Jasmadi, M.Ag dan Bapak Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing serta megarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga besar UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan UPTD Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung atas perkenankannya penulis meminjam buku literatur yang dibutuhkan.
6. Bapak Sigit Irwanto selaku Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk mengadakan penelitian tersebut.
7. Ibu Bertiati selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Negeri Agung dan segenap pengurus yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, Januari 2020

Ghiffari Ananda Gumay

NPM. 1541020078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERYANTAAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Metodologi Penelitian.....	12
H. Kajian Penelitian Terdahulu	19

BAB II FUNGSI BUMDES DALAM PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

A. Fungsi BUMDes	22
1. Pengertian BUMDes	22
2. Tujuan Pendirian BUMDes	22
3. Modal BUMDes.....	26
4. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes	27
5. Prinsip Pengelolaan BUMDes	31
6. Fungsi BUMDes dalam Pengembangan Usaha	33
B. Pengembangan Usaha Masyarakat Desa	36
1. Pengertian Pengembangan Usaha	36
2. Jenis-jenis Pengembangan Usaha Masyarakat Pedesaan.....	37
3. Strategi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa	39
5. Masalah dan Tantangan Pengembangan Usaha.....	41
6. Strategi yang Bisa Ditempuh	44

BAB III BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG

A. Gambaran Umum Desa Negeri Agung dan Kegiatan Sosial Masyarakat.....	49
1. Sejarah Singkat Desa Negeri Agung	49
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Negeri Agung.....	50
3. Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Negeri Agung.....	52
B. Gambaran Umum BUMDes Desa Negeri Agung.....	57
1. Organisasi BUMDes	57
2. Struktur Kepengurusan BUMDes	58
3. Maksud Dan Tujuan BUMDes	59
4. Jenis Usaha BUMDes	60
C. Pengembangan Usaha Masyarakat Melalui BUMDes.....	60
1. Pengelolaan BUMDes Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat	60
2. Kegiatan BUMDes Dalam Pengembangan SDM.....	66

BAB IV FUNGSI BUMDES DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DESA NEGERI AGUNG

A. Fungsi BUMDes Dalam Upaya Pengembangan Usaha.....	69
B. Kegiatan BUMDes Dalam Pengembangan SDM.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

Daftar Pustaka.....	79
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Berturut-turut Nama Kepala Pekon/Desa Negeri Agung	50
2. Jumlah Penduduk	52
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan	52
4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama	54
5. Prasarana Pekon/Desa	55
6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	56
7. Kepemilikan Hewan Ternak	56
8. Struktur Kepengurusan BUMDes	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Dokumentasi
4. Daftar Sampel
5. Gambar
6. SK Judul
7. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Desa Negeri Agung
8. Kartu Konsultasi Skripsi
9. Kartu Hadir Munasqosyah
10. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi
11. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
12. Surat Keterangan Kepala Desa

DAFTAR GAMBAR

1. Dokumentasi Bersama Sampel
2. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar pembahasan lebih terarah, maka terlebih dahulu dibuat penegasan judul yang menjelaskan alur dan maksud penelitian. Adapun judul skripsi penulis adalah : “Fungsi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.” Uraian sebagai berikut:

Fungsi, adalah suatu proses yang didalamnya terdapat beberapa komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan bertujuan untuk menghasilkan suatu tujuan.¹ Adapun fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Dapat disimpulkan fungsi adalah kegunaan suatu hal atau juga daya guna suatu pekerjaan yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan

¹ Hamdani Yusuf, Puji Lestari, *Fungsi Sosial Kebersamaan Banyumas Cycling Community (BCC)*, jurnal Pendidikan Sosiologi, hlm.4, eprints.uny.ac.id diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul 20:00

tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.²

Jadi fungsi BUMDes yang dimaksud dalam penulisan ini adalah BUMDes sebagai lembaga usaha peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembukaan lapangan kerja.

“Pengembangan” Secara Terminologi berarti usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pengembangan meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya.³

Sementara “Usaha” merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan, Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu *value* dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada.⁴

“Masyarakat.” Adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Manusia, sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai

² Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal of Rural and Development, Vol.5 No.1 Februari 2014, hlm.1, <https://jurnal.uns.ac.id> diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul 20:15

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.39

⁴ Tejo Nurseto, *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah Yang Tangguh*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol.1 No.1 Februari 2004, hlm.3, eprints.stainkudus.sc.id diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul 20:20

kebutuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan dapat bersifat individual atau kolektif.⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari penulisan ini adalah akan mengkaji tentang upaya-upaya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam pengembangan usaha seperti pelatihan dan pemberian fasilitas di bidang usaha baik dalam bentuk usaha industri, jasa, yang berada di Desa Negeri Agung dalam memberi solusi dan peluang kerja agar ekonomi warga Negeri Agung dapat lebih berkembang dengan lebih baik.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul ini adalah :

1. BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Disamping itu BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha ataupun lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa.
2. Judul ini sesuai dengan konsentrasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) yaitu Fungsi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

⁵ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 25

3. Peneliti tertarik dengan permasalahan ini karena penelitian ini sangat menarik untuk diteliti serta adanya ketersediaan bahan literatur yang memadai serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, pemerintah terus berupaya menjalankan program-program untuk menaggulangi kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan terkait dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal diantaranya pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”, pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat pelayanan kesehatan. Ayat (2) Setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartbat. Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sebagai penyelenggara Negara pemerintah wajib menjalankan amanah Undang-undang untuk mengetaskan kemiskinan. Usaha-usaha yang

dilakukan khususnya pemerintah daerah dituangkan dalam program-program strategis untuk menanggulangi kemiskinan.⁶

Faktor faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro yaitu, *pertama* Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua* Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah. *Ketiga* Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti pendapatan. Tapi itu hanyalah masalah klasik. Sekarang penyebab kemiskinan adalah karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih

⁶ Nurmasiyah, Mislinawati, *Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Jurnal Pesona Dasar, Vol.1 No.5 April 2017, hlm.33

tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah seperti masuk perguruan tinggi atau SMA.⁷

Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khusus nya pembangunan pada daerah yang relative memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional. Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat

⁷ Itang, *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol.16 No.1 Januari-Juni 2015, hlm.7

desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, semata-mata ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan tingkat pusat dan implementasi kebijaksanaan tersebut tampak dari berbagai kebijaksanaan di tingkat Provinsi, Kabupaten Daerah Tingkat II, sampai ke Kecamatan dan Desa. Sisi lain yang berperan, yakni komponen masyarakat dengan tingkat kesadaran akan partisipasi masyarakat, berupa dana, tenaga, dan pikiran secara konkret membangun desa.⁸

Banyak warga masyarakat desa yang ingin meningkatkan taraf kehidupannya dengan membuka suatu usaha seperti berdagang atau berbisnis, namun untuk mewujudkan hal tersebut banyak warga masyarakat yang mengeluh karena kurangnya modal untuk membuka suatu usaha tersebut, sehingga potensi yang ada pada warga masyarakat di desa yang ingin berkembang tidak dapat terealisasi dan pada akhirnya masyarakat yang ingin meningkatkan taraf kehidupannya dari garis kemiskinan sulit untuk terwujud.

Namun ketika pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan desa mereka. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah badan usaha milik desa (BUMDes).

⁸ Tinneke Meiske Tumbel, *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.1 No.2 Tahun 2014, hlm.1

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha.

Badan Usaha Milik Desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini juga berdasarkan Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.⁹

Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: “dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

⁹ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1 No 6, hlm. 1068

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaan-nya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.¹⁰

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sangat berarti bagi kesejahteraan masyarakat desa, karena memberikan manfaat yang begitu besar seperti mampu membantu masyarakat dalam mengenal dan memanfaatkan potensi yang ada, membuka lapangan pekerjaan, mendirikan suatu usaha dan lain sebagainya. Pada dasarnya Badan usaha milik desa bertujuan untuk mensejahterakan dan menghidupkan perekonomian desa.

Salah satu desa yang telah mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah Desa Negeri Agung. Desa Negeri Agung terletak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Desa Negeri Agung adalah salah satu desa tua yang berdiri sejak tahun 1932 pada waktu pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini setelah melalui proses pemekaran Pekon/Desa satu kali

¹⁰ *Ibid*, hlm.1069

yaitu dimekarkan salah satu pedukuhan yang saat ini menjadi Desa Sinar Semendo.

BUMDes Desa Negeri Agung di dirikan pada tanggal 6 September 2016 berdasarkan Peraturan Pekon Negeri Agung nomor 3 tahun 2016 tentang pendirian badan usaha milik Desa (BUMDes) Desa Negeri Agung. Adapun maksud dan tujuan pembentukan BUMDes Desa Negeri Agung adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Negeri Agung, untuk meningkatkan perekonomian Desa Negeri Agung, meningkatkan pendapatan asli Desa Negeri Agung, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Negeri Agung.¹¹

Salah satu program BUMDes Desa Negeri Agung dalam meningkatkan potensi usaha perekonomian masyarakat adalah dengan memberikan penambahan modal usaha kepada bengkel variasi mobil dan motor milik bapak Toupan. Penambahan modal yang diberikan oleh BUMDes kemudian dikelola untuk menjalankan usaha oleh masyarakat, dan dalam pemasaran produk hasil usaha di bantu oleh BUMDes.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi pembahasan skripsi tentang Fungsi BUMDes dalam pengembangan usaha di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

¹¹ Peraturan Pekon Negeriagung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Pekon (Bumpekon) Pekon Negeriagung, hlm.4

¹² Rencana Program BUMDes Desa Negeri Agung, 2016

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan hal berikut:

Bagaimana fungsi BUMDes dalam upaya pengembangan usaha di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuannya adalah:

Untuk mengetahui fungsi BUMDes dalam upaya pengembangan usaha di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk pengembangan kegiatan BUMDes yang berkaitan dengan pengembangan usaha masyarakat desa.
2. Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memecahkan suatu masalah baik, bagi para peneliti maupun orang-orang atau instansi yang menerapkan hasil penelitian ini.
3. Dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang dalam pengembangan usaha masyarakat.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial.¹³ Secara terminologis, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti sendirilah instrumennya.¹⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang yang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei. Penelitian ini menggambarkan tentang Fungsi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat.¹⁶

¹³ Noor Juliansyah dan Ahmadi, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.34

¹⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.4

¹⁵ *Ibid*, hlm.241

¹⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.35

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah secara keseluruhan objek yang akan di teliti. Populasi juga merupakan suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti. Obyek peneliti dapat berupa makhluk hidup, benda, system dan prosedur, fenomena dan lain-lain.¹⁷ Secara ideal, kita meneliti seluruh anggota populasi. Apabila kita melakukan penelitian pada seluruh populasi, berarti kita melakukan sensus. Akan tetapi, seringkali populasi penelitian cukup besar sehingga tidak mungkin untuk diteliti seluruhnya dengan waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia. Dalam keadaan demikian, maka penelitian hanya dapat dilakukan terhadap sampel.¹⁸

Populasi dalam peneltian ini berjumlah 29 orang yang teridiri dari, 13 pengurus BUMDes, dan 16 orang anggota usaha yang terikat dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Negeri Agung.

b. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Hal ini akan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet.Ke-14, hlm.109

¹⁸ Irawan Soeharto, *Op.Cit*, hlm.57

berkaitan dengan bagaimana cara mengambil sampel atau teknik sampling yang digunakan.¹⁹

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti.²⁰

Penulis membuat kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurus BUMDes:

- a. Pengurus BUMDes yang mengerti dan paham program pelaksanaan program BUMDes dalam pengembangan usaha masyarakat.
- b. Pengurus BUMDes yang aktif dalam pelaksanaan program BUMDes khususnya dalam program pengembangan usaha.
- c. Pengurus BUMDes yang dapat memberikan data-data terkait dengan program BUMDes dalam pengembangan usaha.

Dalam kriteria ini sampel yang diambil berjumlah 4 orang pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Negeri Agung.

¹⁹ *Ibid*, hlm.57

²⁰ *Ibid*, hlm.63

2. Masyarakat Desa:

- a. Masyarakat Desa yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pelaksanaan program BUMDes.
- b. Masyarakat Desa Negeri Agung pemilik usaha dan karyawan usaha yang terikat dengan program BUMDes.
- c. Masyarakat Desa yang usahanya terikat dengan BUMDes sudah dalam jangka waktu cukup lama minimal 6 bulan.

Dalam kriteria ini sampel yang diambil berjumlah 3 warga masyarakat pemilik usaha yang terikat dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Negeri Agung.

Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 7 orang, yang terdiri dari 4 orang pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 3 warga masyarakat pemilik usaha yang terikat dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Negeri Agung.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara (*Interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat

perekam (*tape recorder*). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon.²¹

Penulis melakukan wawancara tujuannya adalah untuk mendapatkan data secara internal maupun eksternal. Secara internal misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi. Sedangkan secara eksternal yaitu jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan dan lain sebagainya.

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut.

1. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis.
2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan.

²¹ *Ibid*, hlm 68

3. Pengamatan tersebut di catat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.
4. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan realibilitasnya.²²

Berdasarkan cara pengamatan yang dilakukan, observasi (pengamatan) juga dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Pengamatan yang tidak berstruktur
2. Pengamatan berstruktur

Pada pengamatan yang tidak berstruktur, si peneliti tidak mengetahui aspek-aspek apa dari kegiatan-kegiatan yang ingin diamatinya relevan dengan tujuan penelitiannya. Peneliti juga tidak mempunyai suatu rencana tentang cara-cara pencatatan dari pengamatannya sebelum ia kerja mengumpulkan data.²³

Pengamatan berstruktur berbeda dengan pengamatan tidak berstruktur. Pada pengamatan berstruktur, si peneliti telah mengetahui aspek apa dari aktivitas yang diamatinya yang relevan dengan masalah serta tujuan peneliti, dengan pengungkapan yang sistematis untuk menguji hipotesisnya.²⁴

Disini penulis menggunakan metode observasi (pengamatan) secara berstruktur, karena penulis telah

²² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 154

²³ *Ibid*, hlm.155

²⁴ *Ibid*, hlm.159

mengetahui aspek apa dari aktivitas yang diamatinya yang relevan dengan masalah serta tujuan peneliti.

Penulis menggunakan metode observasi (pengamatan) tujuannya untuk menggali data seperti ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan yang terkait dengan aktivitas fungsi BUMDes dalam pengembangan usaha masyarakat di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-surat resmi.²⁵ Data yang didapatkan bersumber dari dokumentasi tertulis yang resmi sesuai dengan keperluan penelitian agar data yang didapatkan valid, konkrit dan obyektif.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang struktur organisasi, dokumen-dokumen program BUMDes dan data-data lain yang terkait masalah penelitian yang penulis lakukan.

²⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.73

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian terdahulu mempunyai tujuan yaitu melihat tema-tema yang sama dengan judul skripsi yang akan diteliti. Diantara tema yang sama yaitu:

1. Skripsi M. Atsil M.A, NPM 1341020040 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”. Skripsi ini membahas bagaimana proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan dibukanya beberapa unit usaha yang merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat.²⁶ Dan perbedaan dengan skripsi yang penulis fokuskan adalah penulis membahas mengenai fungsi BUMDes dalam pengembangan usaha, upaya-upaya apa saja yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan suatu unit usaha di masyarakat.
2. Skripsi Rufaidah Aslamiah, NPM 13250098 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk

²⁶ M. Atsil M.A, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*, (Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm.4

Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta”. Skripsi ini membahas peran apa saja yang dilakukan oleh BUMDes dalam menanggulangi sampah melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS), dan juga dampak sosial-ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Desa Panggungrejo.²⁷ Perbedaan dengan skripsi yang penulis fokuskan adalah penulis membahas tentang fungsi BUMDes dalam pengembangan usaha masyarakat melalui upaya-upaya seperti member penambahan modal usaha kepada masyarakat Desa Negeri Agung.

3. Skripsi Nofiratullah, NPM 14130051 Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dengan judul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”. Skripsi ini meneliti implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendeskripsikan problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa

²⁷ Rufaidah Aslamiah, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*, (Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm.4

Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.²⁸ Perbedaan dengan skripsi yang penulis fokuskan adalah penulis membahas upaya yang dilakukan BUMDes dalam pengembangan usaha masyarakat di Desa Negeri Agung.

Berdasarkan skripsi diatas, maka isi skripsi ini berbeda dengan isi skripsi yang penulis teliti, penulis mengambil judul skripsi “Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus”. Skripsi ini membahas mengenai upaya-upaya BUMDes dalam mengembangkan usaha masyarakat seperti penambahan modal usaha, membantu pemasaran produk hasil usaha dan pemberian peralatan kebutuhan usaha.

²⁸ Nofiratullah, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, (Pendidikan Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm.4

BAB II

FUNGSI BUMDES DALAM PENGEMBANGAN USAHA

A. Fungsi BUMDes

1. Pengertian BUMDes

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya di singkat BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹

BUMDes adalah usaha kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat yang bersifat unik, yang berbeda dengan jenis-jenis usaha lain seperti koperasi, CV, PT maupun BUMN dan BUMD. Salah satu keunikan yang menonjol adalah bahwa BUMDes bukan hanya bisnis ekonomi semata, tetapi juga mengandung bisnis sosial.²

2. Tujuan Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang di kelola oleh desa dan/atau kerja sama bidang antar-desa. Di dalam pasal 3 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:

¹ Herry Kamaroesid, *Tata Cara pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 2

² *Ibid*, hlm. 10

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli desa.³

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar BUMDes dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya serius

³ *Ibid*, hlm.18

untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 (ayat 3) bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam Pasal 5 ayat (2) butir a Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan “pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat” dengan demikian BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.⁴

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (PLM), yang di wujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai bahan hukum yang

⁴ *Ibid*, hlm.19

berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme “*selfhelp*” dan “*member-base*”, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).⁵

3. Modal BUMDes

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas:

- a. Penyertaan modal Desa; dan
- b. Penyertaan modal masyarakat Desa

Penyertaan modal Desa terdiri atas:

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

⁵ *Ibid*, hlm. 20

- b. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- d. Asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.⁶

4. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

a. BUMDes Banking

Sesuai dengan namanya, jenis BUMDes ini berfokus pada bisnis keuangan yakni dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa. Tujuan BUMDes banking mengurangi jeratan warga masyarakat dari rentenir sekaligus mempermudah akses kredit bagi warga masyarakat terutama kaum miskin. Berbeda dengan Bank lainnya badan usaha desa ini memberikan bunga beban yang lebih rendah karena memang Bank Desa berorientasi pada membantu dan mensejahterakan

⁶ *Ibid*, hlm. 31

kehidupan masyarakat. Contohnya unit usaha dana bergulir, Bank Desa, Lembaga keuangan mikro desa, dan lainnya.⁷

b. BUMDes Serving

Serving adalah salah satu jenis BUMDes yang fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang ditujukan pada seluruh masyarakat. Jenis usaha ini tidak terlalu berfokus pada pencarian keuntungan karena memang pada dasarnya motif mereka adalah sosial. Jadi mereka benar-benar melayani masyarakat tanpa terkecuali. Contohnya lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya.⁸

Air bersih merupakan sumber kehidupan manusia, pengelolaan air bersih secara mandiri oleh desa melalui BUMDes itu sebenarnya merupakan sebuah perubahan yang mengandung pelajaran berharga. Pemerintah, lembaga-lembaga internasional, LSM maupun CSR perusahaan lama membangun sarana air bersih yang dekat dengan masyarakat di banyak tempat. Proyek PAMSIMAS, PNPM Mandiri pedesaan maupun proyek rekonstruksi pasca bencana juga membangun sarana air bersih di banyak desa. Pasca proyek pihak pelaksana menyerahkan kepada masyarakat setempat agar di rawat dan dikelola secara berkelanjutan. Namun di berbagai tempat tidak sedikit sarana air bersih yang dihibahkan kemasyarakat itu terbengkalai dan tidak berfungsi. Mengapa ? sebagian karena menggunakan perangkat yang

⁷ Ahmad Dian, *Badan Usaha Milik Desa*, diakses dari <http://dosenekonomi.com//> diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul 8.20

⁸ *Ibid*

mahal sehingga tidak mampu dikelola secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat setempat. Tetapi penyebab paling besar adalah ketiadaan otoritas dan tatakelola pada kelompok masyarakat yang mengelola air bersih. Karena itu pengelolaan air bersih oleh BUMDes merupakan cara baru, sebuah bentuk perubahan pengelolaan dari masyarakat yang anonym kepada desa. Kehadiran BUMDes itu melahirkan otoritas dan tatakelola air bersih yang digerakan oleh desa.⁹

c. BUMDes Brokering

Yang dimaksud dengan brokering adalah perantara, jadi tugas BUMDes ini bisa disebut dengan lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama. Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawah nya. Jenis usaha ini juga bisa disebut dengan jenis usaha yang menjual pelayanan kepada para warga dan usaha-usaha kecil masyarakat. Contohnya jasa pembayaran listrik, PAM, Telpon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan masih banyak lainnya.¹⁰

Dengan adanya BUMDes brokering ini atau sebagai perantara, petani menjadi lebih mudah dalam menjual hasil bumi nya karena BUMDes brokering membantu dalam penjualan hasil pertaniannya, sehingga petani tidak khawatir dalam mencari konsumen yang ingin

⁹ Herry Kamaroesid, op.cit, hlm.5

¹⁰ Ahmad Dian, op.cit

membeli hasil pertaniannya. Dan bagi masyarakat luas, BUMDes brokering yang lainnya seperti jasa pembayaran listrik, PAM dan telpon sangat memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran listrik, PAM, telpon dan lainnya, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi dan mengantri untuk membayarnya de kantor setempat, karena di desa sudah menyiapkan layanan untuk pembanyaran tersebut sehingga mempermudah dan menghemat waktu untuk melanjutkan pekerjaan sehari-hari seperti bertani dan lainnya.

d. BUMDes Renting

Renting merupakan jenis badan usaha desa yang berfokus pada bidang penyewaan yakni dengan melayani semua masyarakat desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin sewa-menyewa lebih dikenal di kota namun ternyata ausaha ini sudah sejak lama dilaksanakan di desa. Contohnya : penyewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung, perkakas pesta dan lain sebagainya.¹¹

Dalam banyak kasus penyewaan traktor juga menjadi bentuk proteksi desa terhadap petani. Di kala musim tanam, permintaan akan traktor pasti tinggi, dengan harga sewa tinggi yang dimainkan oleh swasta. Dalam kondisi ini desa hadir menyewakan traktor kepada petani dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan bisa di bayar setelah panen.¹²

¹¹ *Ibid*

¹² Herry Kamaroesid, op.cit, hlm.5

e. BUMDes Trading

Trading merupakan salah satu jenis usaha di BUMDes yang memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya : Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan dan lain sebagainya.¹³

5. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar di pahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dalam Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007: 13) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

¹³ Ahmad Dian, op.cit

- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.¹⁴

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga kemungkinan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat di gunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama (*cooperative*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*stream engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.¹⁵

¹⁴ Herry Kamaroesid, op.cit, hlm.20

¹⁵ *ibid*, hlm. 20

6. Fungsi BUMDes Dalam Pengembangan Usaha

Badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha.¹⁶

Dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 (ayat 3) bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam Pasal 5 ayat (2) butir a Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan “pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat” dengan demikian BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

¹⁶ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwandono, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No 6, hlm. 1068

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.¹⁷

Tujuan dari gagasan menjalankan usaha/proyek adalah untuk memperoleh keuntungan atau kemanfaatan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan suatu perencanaan secara menyeluruh beserta kebijakan yang diperlukan. Untuk itu perlu disusun suatu program kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menyusun kegiatan-kegiatan yang diperlukan.

Aspek manajemen dalam membangun usaha hendaklah didasarkan pada pendekatan fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Tujuan kajian pada aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah pembentukan dan pelaksanaan usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan.

Perencanaan dalam anggaran unit usaha BUMDes juga harus dilakukan dengan sebaik mungkin, misalnya membuat anggaran pembelian, anggaran

¹⁷ *Ibid*, hlm.19

produksi, anggaran penjualan, dan anggaran lainnya di sesuaikan keperluan usaha yang akan dijalankan. Dalam merencanakan anggaran harus detail, misalnya anggaran pembelian bahan, bahan apa dan berapa jumlahnya yang akan dibeli, berapa harganya, siapa yang menangani pembelian, dimana membelinya, dan sebagainya.¹⁸

Pengendalian atau pengawasan di dalam manajemen memiliki berbagai fungsi pokok. Fungsi pokok pengendalian tersebut adalah:

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan. Ini dapat dilakukan dengan pengawasan secara rutin disertai adanya ketegasan-ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.
- b. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan telah terjadi, hendaknya pengawasan/pengendalian dapat menghasilkan perbaikan.
- c. Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga setiap unit organisasi selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efisien.
- d. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian/pengawasan yang rutin, setiap unit organisasi berikut karyawannya dapat selalu mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan benar.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35

¹⁹ *Ibid*, hlm 37

B. Pengembangan Usaha Pada Masyarakat Desa

1. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pengembangan meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan social-budaya.²⁰

Pengembangan secara etimologi berasal dari kata kembang yang berarti menjadi tambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan *pe-* dan *-an* sehingga menjadi pengembang yang artinya proses, cara atau perbuatan mengembangkan. Jadi pengembangan di sini adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya.²¹

“Usaha” merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan, Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu *value* dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada.²²

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 39

²¹ FKIP Universitas Jambi, *Pengertian Pengembangan*, <http://repository.fkip.unja.ac.id/> diakses pada tanggal 8 November 2018, pukul 09:51

²² Tejo Nurseto, *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah Yang Tangguh*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol.1 No.1 Februari 2004, hlm.3, eprints.stainkudus.sc.id diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul 20:20

Dalam dunia atau pun aktivitas ekonomi, usaha sering kali diartikan sebagai sebuah bisnis. Dalam hal ini, usaha merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Orang-orang yang melakukan aktivitas usaha atau pun bisnis biasanya disebut dengan istilah pebisnis atau pun pengusaha.²³

Pengembangan Usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha.²⁴

2. Jenis-jenis Pengembangan Usaha Masyarakat Pedesaan

Bidang usaha yang dapat digeluti untuk pemula sesuai dengan minat dan bakat, terutama untuk usaha kecil dan menengah antara lain sebagai berikut.

a. Sektor Kecantikan

Usaha di sektor kecantikan contohnya membuka usaha salon atau kecantikan lainnya, sebaiknya calon pengusaha terlebih dahulu memahami seluk-beluk kecantikan, misalnya dengan cara mengikuti kursus kecantikan. Dengan demikian, pengusaha tersebut lebih mudah mengelola usahanya dan tidak tergantung kepada anak buah jika terjadi suatu masalah.

²³ Adzikra Ibrahim, *Pengertian Usaha Dalam Berbagai Bidang*, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-usaha-dalam-berbagai-bidang/> diakses pada tanggal 8 November 2018, pukul 10:03

²⁴ Pinta, *Pengembangan Usaha*, <http://blog-pinta.blogspot.com/2013/06/kewirausahaan-4953.html?m=1/> diakses pada tanggal 8 November 2018, pukul 09:44

b. Sektor Keterampilan/Perbengkelan

Contoh usaha sektor keterampilan anatara lain sektor jasa perbaikan (*service*), seperti service elektronik (televisi, radio, kulkas, AC), Motor (sepeda motor atau mobil), atau service mesin-mesin.

c. Industri Rumah Tangga

Sektor industri sangatlah luas dan beragam. Sektor ini akan menghasilkan suatu produk olahan. Untuk usaha kecil dan menengah misalnya membuka pabrik makanan seperti, tempe, tahu, kerupuk, roti, atau usaha industri batu bata, genteng dan konveksi.

d. Sektor Agribisnis

Usaha di sektor agribisnis dapat dilakukan dengan membuka pertanian jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya usaha penanaman sayur-mayur, jangka menengah misalnya pisang, coklat, dan untuk jangka panjang misalnya penanaman kopi dan lada.

e. Sektor Perdagangan

Usaha di sektor perdagangan dapat dilakukan dengan membuka toko atau kios; membuka usaha seperti bakso, mie ayam, es teller, martabak, nasi goreng, warung, dan sektor perdagangan lainnya.

f. Sektor Seni/Kerajinan

Bagi mereka yang memiliki bakat seni, usaha yang dapat dilakukan antara lain mengerjakan seni lukis, musik, ukir, atau menjadi penulis cerita.²⁵

3. Strategi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa

a. Lokasi yang Strategis

Lokasi merupakan letak atau tempat dimana suatu usaha tersebut dijalankan. Menurut Kotler (2008:51) “Salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi, lokasi dimulai dengan memilih komunitas”. Keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik, dan sebagainya.

b. Memaksimalkan Jumlah Pelanggan Tetap

Dengan memanfaatkan kekuatan internal berupa faktor kemampuan memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan konsumen, mampu menjaga kontinuitas untuk memenuhi permintaan yang ada, sudah mempunyai pelanggan tetap tapi masih sedikit jumlahnya, dan terjalinnya hubungan yang baik dengan semua pelanggan bisa menjadi modal untuk memanfaatkan peluang yang ada yaitu hubungan baik dengan pembeli/pelanggan, dengan memanfaatkan kepercayaan yang ada bisa ditingkatkan menjadi pelanggan tetap usaha.

²⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2012), hlm. 44

c. Melakukan Inovasi dan Variasi Produk

Banyaknya kompetitor yang bermunculan men-dorong perlunya sebuah inovasi dan variasi produk. Hal ini diperlukan guna memaksimalkan penjualan dan menarik perhatian pelanggan.

d. Pemanfaatan Teknologi Dalam Melakukan Promosi Yang Intensif

Dengan melakukan promosi lebih agresif, bisa mengatasi kelemahan tempat yang kurang strategis karena lokasinya jauh dari jalan utama, juga kelemahan belum dilakukannya promosi secara agresif. Sehingga dengan dilakukannya promosi akan lebih memaksimalkan dan memanfaatkan potensi lokasi yang startegis.

e. Penerapan Sistem Manajemen Usaha Terutama dalam Srgi Pencatatan Keuangan dan Administrasi

Manajemen usaha merupakan unsur penting dalam menjalankan dan menjaga keberlangsungan usaha. terutama menyangkut sistem pencatatan keuangan ataupun administrasi yang ada menjadi kelemahan utama yang harus segera diatasi. Pagaya (2013) menyatakan bahwa dengan melakukan pencatatan yang baik akan diketahui secara tertulis apakah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UKM sudah efisien, dan juga bisa diketahui pos-pos biaya apa saja yang tidak efisien sehingga margin usaha bisa ditingkatkan.

f. Peningkatan Kualitas SDM guna Memaksimalkan Kapasitas Produksi

Terjaganya hubungan baik dan loyalitas dengan semua karyawan, serta motivasi yang tinggi perlu dimaksimalkan lagi dengan melakukan upaya peningkatan keterampilan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Wahyuningtias (2011) mengemukakan bahwa dengan adanya peningkatan kualitas karyawan ini diharapkan juga dapat bersinergi dengan peningkatan kapasitas produksi.²⁶

4. Masalah dan Tantangan Pengembangan Usaha

a. Ketidak Mampuan Manajemen

Dalam kebanyakan unit usaha, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemiliknya kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya berjalan.

b. Kurang Pengalaman

Idealnya, calon wirausahawan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai (pengalaman kerja mengenai pengoprasian fisik bisnis dan kemampuan konsep yang mencukupi); kemampuan

²⁶ Alyas, Muhammad Rakib, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Sosiohumaniora Volume 19 No.2 Juli 2017, hlm. 118

memvisualisasi, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan bisnis menjadi keseluruhan yang sinergis.

c. Lemahnya kendali Keuangan

Dalam hal ini ada dua kelemahan mendasar yang perlu digaris bawahi, yaitu kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Wirausahawan cenderung sangat optimis dan sering salah dalam menilai uang yang dibutuhkan untuk masuk kedalam bisnis. Sebagai akibatnya, mereka memulai usaha dengan modal yang terlalu sedikit dan tampaknya permodalan yang memadai tidak akan pernah tercapai mengingat perusahaan mereka memerlukan semakin banyak uang untuk mendanai pertumbuhannya.

d. Gagal Mengembangkan Perencanaan Strategis

Terlalu banyak wirausahawan yang mengabaikan proses perencanaan strategis, karena mereka mengira hal tersebut hanya bermanfaat untuk usaha besar saja. Namun, kegagalan perencanaan biasanya mengakibatkan kegagalan dalam bertahan hidup dan ini berlaku untuk keduanya usaha besar maupun usaha kecil. Sebab, tanpa suatu strategi yang didefinisikan dengan jelas, sebuah bisnis tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar.

e. Pertumbuhan Tak Terkendali

Pertumbuhan merupakan suatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan, tetapi pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Pakar manajemen Peter Drucker menyatakan bahwa perusahaan yang baru berdiri dapat diperkirakan mengalami pertumbuhan terlalu pesat meningkat 40 sampai 50 persen. Idealnya, perkembangan harus didanai dari laba ditahan atau dari tambahan modal pemiliknya, tetapi sebagian besar bisnis mengambil pinjaman paling tidak untuk sebagian investasi modalnya.

f. Lokasi yang Buruk

Untuk bisnis apapun, pemilihan lokasi yang tepat untuk sebagian merupakan suatu seni dan untuk sebagian lagi ilmu. Sangat sering, lokasi bisnis dipilih tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang layak. Beberapa wirausahawan memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong. Akibat ketidaktepatan lokasi ini, penjualan tidak berkembang dan bisnis tersebut terancam gagal.

g. Pengendalian Persediaan yang Tidak Baik

Umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan manajer bisnis kecil adalah persediaan, namun pengendalian persediaan adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang paling sering diabaikan. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan

kekurangan dan kehabisan stok, yang akhirnya mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi.

h. Ketidakmampuan Membuat Transisi Kewirausahaan

Berhasil melewati tahap awal kewirausahaan bukanlah jaminan keberhasilan bisnis. Setelah berdiri, pertumbuhan biasanya memerlukan perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Kemampuan-kemampuan yang tadinya membuat seorang wirausahawan berhasil seringkali mengakibatkan ketidakefektifan manajerial. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk mendelegasikan wewenang dan melepaskan kegiatan pengendalian sehari-hari sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak wirausahawan.²⁷

5. Strategi yang Bisa Ditempuh

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Rencana usaha yang akan dijalankan melalui pengembangan BUMDes secara rutin memerlukan kelayakan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Keberadaan SDM hendaknya di analisis untuk menjawab apakah memiliki SDM yang diperlukan untuk menjalankan unit usaha BUMDes secara layak.

Kajiannya dapat dimulai dari merencanakan siapa yang akan memimpin BUMDes atau unit usaha BUMDes dan siapa yang akan

²⁷ Fajri Rahmawati, *Tantangan dan Masalah Dalam Berwirausaha*, diakses dari <http://industri18fajrirahmawati.blogspot.com/> diakses pada tanggal 28 Juni 2019, pukul 10.00

tergabung di dalam timnya. Menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan dan siapa yang akan melaksanakan. Kesuksesan dalam menjalankan suatu unit usaha sangat tergantung pada SDM yang solid antara manajer pelaksana bersama timnya. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangannya bukan hanya pada keahlian teknis para manajer dan anggota tim semata, tetapi juga kemauan mereka untuk bekerja dengan baik.²⁸

b. Persiapan Aspek Manajemen Dan Aspek SDM

Dalam rangka persiapan aspek manajemen dan aspek sumber daya manusia ini, ada beberapa aktifitas yang harus dilakukan menurut Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007: 15) aktivitas tersebut adalah:

1. Mendisain Struktur Organisasi

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawab) antar personil atau pengelola BUMDes.

2. Menyusun Job Deskripsi (gambaran pekerjaan)

Menyusun job deskripsi sangat diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap

²⁸ Herry Kamaroesid, op.cit, hlm.37

jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

3. Menetapkan Sistem Koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial kedalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan system koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

4. Menyusun Bentuk Aturan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerja sama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris/Pengawas.

5. Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUMDes

Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

6. Menyusun Desain Sistem Informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain system

pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaanya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

7. Menyusun Rencana Usaha

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan di hasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris/Pengawas BUMDes.

8. Menyusun Sistem Administrasi dan Pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakikat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak berkepentingan.

9. Melakukan Proses Rekrutmen

Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun

pemilihannya harus didasarkan pada criteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembug desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

10. Menetapkan Sistem Penggajian dan Pengupahan

Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 38

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi dan Noor juliansyah 2014. *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis,Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana
- Arikunto Suharsimi 2002. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta Cet.Ke-14
- Database AD dan ART BUMDes Negeri Agung Jaya
- Kamaroesid, Herry 2016. *Tata Cara pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kasmir 2012. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Meleong 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pekon Negeri Agung No.3 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Pekon(BUMPekon) Pekon Negeri Agung
- Purnomo Setiadi Akbar dan Husaini Usman 2001. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara
- RPJM Pekon Negeri Agung Tahun 2015-2020
- Soehartono, Irawan 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Soetomo 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Nazir, Moh 2014. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia

Jurnal

- Alyas, Muhammad Rakib, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Sosiohumaniora Volume 19 No.2 Juli 2017

Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal of Rural and Development, Vol.5 No.1 Februari 2014

Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1 No 6

Hamdani Yusuf, Puji Lestari, *Fungsi Sosial Kebersamaan Banyumas Cycling Community (BCC)*, jurnal Pendidikan Sosiologi

Itang, *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol.16 No.1 Januari-Juni 2015, hlm.7

Nurmasyitah, Mislinawati, *Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Jurnal Pesona Dasar, Vol.1 No.5 April 2017

Tejo Nurseto, *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah Yang Tangguh*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol.1 No.1 Februari 2004

Tinneke Meiske Tumbel, *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.1 No.2 Tahun 2014

Sumber On-Line

Adzikra Ibrahim, *Pengertian Usaha Dalam Berbagai Bidang*, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-usaha-dalam-berbagai-bidang/> diakses pada tanggal 8 November 2018

Ahmad Dian, *Badan Usaha Milik Desa*, diakses dari <http://dosenekonomi.com/> diakses pada tanggal 10 April 2019

Fajri Rahmawati, *Tantangan dan Masalah Dalam Berwirausaha*, diakses dari <http://industri18fajriahmawati.blogspot.com/> diakses pada tanggal 28 Juni 2019

FKIP Universitas Jambi, *Pengertian Pengembangan*, <http://repository.fkip.unja.ac.id/> diakses pada tanggal 8 November 2018

M. Atsil M.A, “*Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

- Nofiratullah, “*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Pinta, ***Pengembangan Usaha***, <http://blogpinta.blogspot.com/2013/06/kewirausahaan-4953.html?m=1/> diakses pada tanggal 8 November 2018, pukul 09:44
- Rufaidah Aslamiah, “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggungharjo Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017